

PERAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN DALAM PENEGUHAN MASYARAKAT MULTIKULTURAL INDONESIA: PROSPEK DI TENGAH DESAKAN BUDAYA GLOBAL

Oleh: Tolak Totok

*Mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Pascasarjana
Universitas Negeri Yogyakarta*

ABSTRAK

Negara bangsa Indonesia terdiri atas sejumlah besar kelompok-kelompok etnis, budaya, agama dan lain-lain. Indonesia memiliki warisan dan tantangan pluralisme budaya (cultural pluralism) secara lebih mencolok, sehingga dipandang sebagai “lokus klasik” bagi bentukan baru “masyarakat majemuk” (plural society). Keberagaman yang dimiliki negara Indonesia dapat ditinjau dari dua ciri uniknya, pertama secara horizontal, ini lazimnya ditandai dengan kenyataan bahwa adanya kesatuan sosial didasarkan pada perbedaan adat, agama, suku, dan perbedaan kedaerahan, kedua secara vertikal biasanya ditandai dengan adanya perbedaan lapisan atas dan lapisan bawah yang mencolok. Kondisi di atas tergambar dalam prinsip bhinneka tunggal ika, yang berarti meskipun Indonesia adalah berbhinneka, tetapi terintegrasi dalam kesatuan. Pada abad 21, keragaman kultur di Indonesia mendapatkan ujian yang serius, yang ditandai berbagai konflik kekerasan yang bersifat komunal, seperti konflik Ambon, Poso, dan Sambas. Konflik sosial yang berbau SARA ini tidak dapat dianggap remeh, karena kemungkinan akan menyulut konflik di daerah lain, ditambah dengan masuknya budaya global yang tidak terbandung tentu akan menjadikan pluralisme sebagai tantangan bukan keindahan. Persoalan tersebut menggambarkan bahwa masih ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan. Untuk itu, perlu adanya strategi fundamental dalam dunia pendidikan, strategi dalam konteks ini adalah melalui pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang dimaksud dalam hal ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan dalam arti luas yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad 21 yang biasa disebut kewarganegaraan multidimensi yang memiliki karakteristik multikultural. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk peneguhan masyarakat multikultural Indonesia.

Kata Kunci: Pembelajaran PPKn, Multikultural, Budaya Global

A. Pendahuluan

Pengalaman Indonesia sejak masa awal kemerdekaan, khususnya pada masa demokrasi terpimpin Presiden Soekarno dan masa Orde Baru Presiden Soeharto memperlihatkan kecenderungan kuat pada politik monokulturalisme. Lebih lanjut Azra (2006:152) mengemukakan bahwa dalam politik ini, yang diberlakukan bukannya

penghormatan terhadap keragaman (kebhinnekaan, atau multikulturalisme), tetapi sebaliknya adalah keseragaman (monokulturalisme) atas nama stabilitas untuk pembangunan.

Berakhirnya sentralisasi Orde Baru yang memaksakan monokulturalisme, pada gilirannya telah memunculkan kesadaran akan pentingnya memahami kembali kebhinnekaan, multikulturalisme Indonesia. Di samping itu, wacana multikulturalisme Indonesia yang semakin mendapat tempat dalam masyarakat Indonesia disebabkan oleh beberapa kondisi (Saifuddin, 2006:137), *pertama*, desentralisasi mendorong ditingkatkannya batas-batas identitas kebudayaan di Indonesia, baik identitas etnik, agama maupun golongan. Integrasi sosial dan nasional mendapat tantangan besar dari perubahan yang terjadi. *Kedua*, desentralisasi politik masa kini sangat kurang memperhatikan dimensi kebudayaan. Keputusan untuk melaksanakan desentralisasi lebih pada keputusan politik oleh para elit politik partai ketimbang mempertimbangkan dimensi kebudayaan yang sesungguhnya sangat mendasar dan penting. *Ketiga*, ketika batas-batas kebudayaan itu semakin nyata dan tajam, dan orientasi primordialisme mulai memicu konflik yang tajam antar etnik, agama, dan golongan, dan gejala ini dikuatirkan mengancam integrasi bangsa, para elit politik tergesa-gesa mencari obat penawarnya, mencari strategi untuk membangun kembali integrasi bangsa dan kebudayaan mulai diperhatikan.

Berkaitan dengan kondisi di atas, bentuk tubuh Indonesia Baru dari hasil reformasi adalah sebuah “masyarakat multikultural Indonesia”. Berbeda dengan masyarakat majemuk yang menunjukkan keanekaragaman suku bangsa dan kebudayaan suku bangsa, multikulturalisme dikembangkan dari konsep pluralisme budaya dengan menekankan pada kesederajatan kebudayaan yang ada dalam sebuah masyarakat (Suparlan, 2005: 98). Multikulturalisme ini mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (*peaceful coexistence*) dalam perbedaan kultur yang ada baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat (Azra, 2006: 154). Refleksi yang dapat diambil bahwa Individu dalam hal ini dilihat kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya. Dengan demikian, bentuk dari masyarakat Indonesia yang beragam tidak dan bukan lagi dalam bentuk keanekaragaman suku dan budaya bangsa melainkan keanekaragaman kebudayaan yang ada dalam masyarakat Indonesia.

Multikulturalisme meliputi sebuah pemahaman, penghargaan dan penilaian atas budaya seseorang, serta sebuah penghormatan dan keingintahuan tentang budaya etnis orang lain. Ia meliputi sebuah penilaian terhadap budaya-budaya orang lain, bukan dalam arti

menyetujui seluruh aspek dari budaya-budaya tersebut, melainkan mencoba melihat bagaimana sebuah budaya yang asli dapat mengekspresikan nilai bagi anggota-anggotanya sendiri. (Blum, 2001:16).

Tuntutan pengembangan masyarakat multikultural tidak dapat dilepaskan dari kebutuhan warganegara. Memasuki abad ke-21, warganegara suatu bangsa dihadapkan pada berbagai perubahan dan ketidakpastian seiring dengan perkembangan konstelasi kehidupan dalam berbagai aspek, baik aspek politik, sosial, ekonomi, pendidikan, kebudayaan, dan sebagainya. Dalam kehidupan ini, perubahan merupakan suatu kaniscayaan karena tidak ada yang tetap kecuali perubahan itu sendiri. Perubahan merupakan bagian yang melekat dalam kehidupan manusia dan terjadi secara terus menerus. Dalam dimensi manusia, perubahan yang terjadi menyangkut perubahan yang berkaitan erat langsung atau tak langsung dengan pemikiran, sikap, dan tindakan manusia dalam lingkup global, memberi konteks terhadap pemikiran, sikap dan tindakan manusia.

Sebagaimana dikemukakan di atas, potensi konflik dalam masyarakat yang multikultural cukup besar, karena itu pendidikan yang mampu membangun karakter warga negara yang cinta damai mutlak diperlukan. Sebab tanpa kepemilikan karakter tersebut, sulit bagi bangsa dan negara untuk tetap bertahan menghadapi berbagai tantangan, berbagai konflik yang lahir dari realitas kebhinnekaan tersebut. Dalam hal ini, pendidikan adalah jembatan paling penting untuk membentuk karakter masyarakat yang multikultural. Pernyataan Ellen G. White yang dikutip Hidayatullah (2011:24) menyebutkan bahwa pembangunan karakter adalah usaha paling penting yang pernah diberikan kepada manusia. Pembangunan karakter adalah tujuan luar biasa dari sistem pendidikan yang benar. Pernyataan tersebut memberikan penguatan bahwa pembangunan karakter tidak bisa dilepaskan dari pendidikan. Dalam hal ini adalah Pendidikan Kewarganegaraan berbasis multikultural, sebab Pendidikan Kewarganegaraan mengemban nilai karakter bangsa yang salah satunya adalah toleransi, tanggung jawab, dan integritas.

Terkait dengan peneguhan masyarakat multikultural di atas, peran penting pendidikan menjadi tak terelakan. Dalam pandangan Azra (2006:153) peneguhan masyarakat multikultural Indonesia yang sehat tidak bisa secara *taken for granted* atau *trial and error*. Sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated* dan berkesinambungan. Salah satu strategi penting itu adalah Pendidikan Kewarganegaraan yang diselenggarakan melalui seluruh lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, dan bahkan informal di masyarakat.

Secara sederhana, Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) merupakan salah satu bidang kajian dalam konteks pendidikan nasional yang memiliki peran strategis bagi pembentukan karakter bangsa (*nation and character building*) di tengah heterogenitas masyarakat Indonesia. Realitas pluralitas dan heterogenitas tersebut tergambar dalam prinsip berbhineka, tetapi integrasi dalam kesatuan. Untuk itu, PKn menemukan momentumnya menjadi topik sentral dalam membangun negara bangsa Indonesia. Dengan demikian, masyarakat multikultural Indonesia tidak bisa dibangun secara *taken for granted* atau *trial and error*, sebaliknya harus diupayakan secara sistematis, programatis, *integrated* dan berkesinambungan. Salah satu strategi yang bisa dilakukan dalam konteks tersebut adalah melalui pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang dimaksudkan dalam hal ini adalah pendidikan kewarganegaraan dalam arti luas (*citizenship education*) yang memiliki perspektif kewarganegaraan dunia abad ke-21 yang terkenal dengan sebutan kewarganegaraan multidimensi yang salah satu cirinya memiliki karakteristik multikultural (Cogan & Derricott 1998:116). Terdapat delapan karakteristik yang merupakan karakteristik warga abad kedua puluh satu dalam perspektif PKn abad ke-21 (Karsten, Kubow, Matrai, & Pitianuwat, 2000: 13; Kubow, Grossman, & Ninomiya, 2000: 132). Diantaranya sebagai berikut:

1. Kemampuan untuk melihat dan mendekati masalah sebagai anggota masyarakat global.
2. Kemampuan untuk bekerja dengan orang lain secara kooperatif dan bertanggung jawab atas peran / tugas seseorang di masyarakat.
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, menghargai dan menoleransi perbedaan budaya.
4. Kemampuan berpikir secara kritis dan sistematis.
5. Kesiapan untuk menyelesaikan konflik dengan cara tanpa kekerasan.
6. Keinginan untuk mengubah gaya hidup dan kebiasaan konsumsi seseorang untuk melindungi lingkungan.
7. Kemampuan untuk peka terhadap dan membela hak asasi manusia (Hak perempuan, etnis minoritas).
8. Kesiapan dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

Penulisan karya tulis ini didasarkan pada teori bahwa PKn merupakan salah satu ujung tombak dari pendidikan multikultural dalam rangka pembentukan karakter warga negara multikultural yang menghargai identitas budaya masyarakat yang plural

secara demokratis, dan membentuk mosaik yang indah (*cultural pluralism: mozaik analogy*) dalam satu semboyan Bhinneka Tunggal Ika (Garcia, 1982: 37-42).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana peran pembelajaran PKn berbasis multikultural dalam meneguhkan masyarakat multikultural Indonesia”. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pengetahuan dan wawasan yang lebih mendalam mengenai pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk peneguhan masyarakat multikultural Indonesia.

B. Pembahasan

1. Multikultural dan Pendidikan Multikultural

Penjelasan yang sesuai untuk dijadikan referensi adalah pendapat Grace C. Huerta. Baginya, *Multicultural education is an all encompassing approach to educational policy which affects administrative processes, faculty recruitment, student retention, pedagogy, evaluation, as well as curriculum design*. Dengan kata lain Pendidikan multikultural adalah pendekatan menyeluruh terhadap kebijakan pendidikan yang mempengaruhi proses administrasi, retensi siswa, pedagogi, evaluasi, serta desain kurikulum (Huerta, 2016: 150).

Pendapat yang secara substansial sama juga dikemukakan oleh Bank (1993: 359) bahwa pendidikan multikultural adalah reformasi transformasional yang dirancang untuk mengubah total lingkungan pendidikan sehingga beragam kelompok ras dan etnis, baik kelompok gender, dan siswa dari setiap kelompok kelas sosial akan mengalami kesempatan pendidikan yang sama di sekolah dan universitas. Lebih lanjut Bank menjelaskan Pendidikan multikultural mengasumsikan bahwa keragaman adalah bagian berharga dari jalinan negara juga masyarakat global. Multikulturalis berpendapat bahwa keragaman memperkaya masyarakat dan meningkatkan cara-cara di mana warga negara dapat memecahkan masalah.

Untuk itu, pendidikan sangat diperlukan terutama oleh negara demokrasi baru seperti Indonesia, untuk melakukan rekonstruksi sosial dengan mengembangkan *civic skill*, yakni keterampilan menjadi warga dari masyarakat demokratis yang di antaranya mampu bersikap toleran dan mengakomodasi berbagai jenis perbedaan untuk kesejahteraan bersama.

Dalam konsep multikulturalisme tercakup tiga sub nilai. *Pertama*, menegaskan identitas kultural seseorang, mempelajari dan menilai warisan budaya seseorang; *Kedua*, menghormati dan berkeinginan untuk memahami dan belajar tentang kebudayaan-kebudayaan selain kebudayaannya; *Ketiga*, menilai dan merasa senang dengan perbedaan-

perbedaan kebudayaan itu sendiri, yaitu memandang keberadaan dari kelompok-kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat seseorang sebagai kebaikan yang positif untuk dihargai dan dipelihara (Arif, 2008: 19).

Sebagai negara kepulauan, keragaman budaya menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Tingkat kemajemukan yang tinggi menjadikannya sebagai negara multikultural. Perbedaan wilayah melahirkan suku, ras, bahasa dan kesenian yang sangat beragam. Keunikan ini merupakan kelebihan tersendiri bagi bangsa Indonesia sangat disayangkan jika kekayaan budaya bangsa Indonesia hilang. Entah dicuri bangsa lain, maupun melebur digerus budaya asing.

Globalisasi dan karakteristik yang semakin multikultural dari banyak negara dan masyarakat telah menyoroti apakah negara mampu mengembangkan warga negara yang berpendidikan multikultural dan terlibat secara global. Bagi sekolah dan guru untuk mempersiapkan warga negara untuk dididik secara multikultural dan terlibat secara global, setidaknya ada dua argumen yang menarik untuk dipertimbangkan. Yang pertama adalah globalisasi dan yang kedua adalah karakter dan pendidikan kewarganegaraan. Kedua alasan ini sangat sesuai dengan sifat ganda yang aktif dan terkait dengan karakter kewarganegaraan seseorang. Untuk mencapai kedua tujuan tersebut, kerangka kecerdasan budaya akan diperkenalkan di sini untuk pengembangan kecerdasan budaya sebagai sarana untuk mengembangkan warga yang aktif dan peduli. Dalam hal ini, juga akan menyarankan bagaimana guru diposisikan untuk menghasilkan pertumbuhan siswa sebagai calon pemimpin melalui pembelajaran budaya di kelas (Goh, 2012: 396). Sementara literatur pendidikan karakter dan kewarganegaraan di Asia sering menyebutkan pemahaman lintas budaya dan pemikiran global sebagai hasil yang diinginkan, hanya sedikit model yang menerjemahkan dengan mudah ke dalam kurikulum kewarganegaraan atau pedagogi kelas. Dengan demikian, untuk menciptakan warga negara muda yang aktif dan peduli diperlukan seorang guru yang memiliki pemahaman atau kecerdasan budaya dan berwawasan global.

Seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan transportasi, kepedulian warga negara terhadap kebudayaan lokal semakin merosot. Kebudayaan warisan nenek moyang terancam hilang, melebur menjadi 'tumbal' globalisasi. Globalisasi memberi pengaruh yang kuat dan nyata terhadap pendidikan serta telah berhasil masuk ke dalam kebijakan pendidikan dan mempengaruhi praktik pengajaran dan pendidikan guru (Wang, Lin, Spalding, Odell, & Klecka, 2011: 119). Maka dari itu, aktualisasi Pendidikan Kewarganegaraan yang memuat nilai nasionalisme sangat diperlukan untuk menjawab dan

membendung arus globalisasi. Sebab, nasionalisme erat kaitanya dengan identitas nasional. Dengan mengembangkan rasa cinta tanah air diiringi gerakan nyata dalam melestarikan budaya, kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia akan terjaga eksistensinya.

2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Multikultural untuk peneguhan masyarakat multikultural indonesia

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan topik sentral yang memiliki peran strategis dalam pendidikan multikultural. Oleh karena itu modus dan isi pembelajaran PPKn yang ada di sekolah termasuk di dalamnya Sekolah Menengah Atas, harus menghargai dan mengeksplorasi nilai-nilai multikultural. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), pendidikan kewarganegaraan merupakan nama mata pelajaran wajib untuk kurikulum pendidikan dasar dan menengah dan mata kuliah wajib untuk kurikulum pendidikan tinggi (Pasal 37). Ketentuan ini lebih jelas dan diperkuat lagi pada Pasal 37 bagian Penjelasan dari Undang-Undang tersebut bahwa “Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air”. Dengan adanya ketentuan UU tersebut maka kedudukan pendidikan kewarganegaraan sebagai basis pengembangan masyarakat multikultural dalam sistem pendidikan di Indonesia semakin jelas dan mantap.

Terkait dengan pendidikan multikultural, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting dalam rangka mempersiapkan peserta didik menjadi warganegara yang memiliki komitmen kuat dan konsisten untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan multikultural di Indonesia sebagaimana dikemukakan oleh Tilaar (2004:192), yaitu membina pribadi-pribadi bangsa Indonesia yang mempunyai kebudayaan sukunya masing-masing, memelihara dan mengembangkannya, serta sekaligus membangun bangsa Indonesia dengan kebudayaan Indonesia sebagaimana yang diamanatkan di dalam UUD 1945.

Terdapat arti penting yang dimiliki Pendidikan Kewarganegaraan bagi pendidikan multikultural di Indonesia didasarkan atas lima dimensi pendidikan multikultural sebagaimana dikemukakan oleh Bank (Tilaar, 2004:138), yaitu:

1. *Content integration*, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata pelajaran/disiplin ilmu.
2. *The knowledge construction process*, membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran (disiplin)

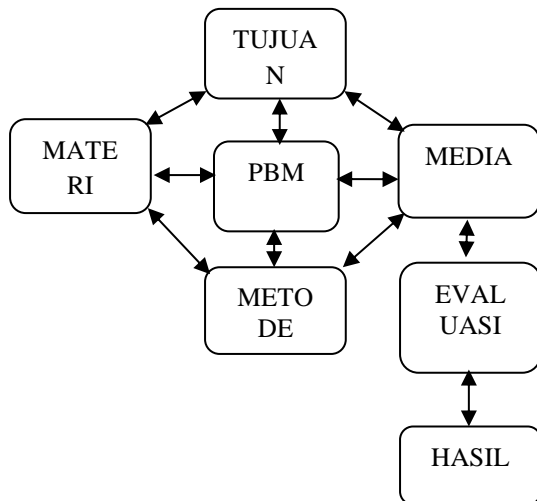
3. *An equity paedagogy*, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari segi ras, budaya ataupun sosial.
4. *Prejudice reduction*, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka.
5. *Empowering school culture*, melatih kelompok untuk berpartisipasi, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis dan ras dalam upaya menciptakan budaya akademik.

Kelima dimensi tersebut, memerlukan dukungan kompetensi/karakteristik yang harus nampak pada diri warganegara. Cogan (1998:115) mengkonstruksi karakteristik yang harus dimiliki warganegara sebagai berikut:

1. Kemampuan mengenal dan mendekati masalah sebagai warga masyarakat global
2. Kemampuan bekerjasama dengan orang lain dan memikul tanggung jawab atas peran atau kewajibannya dalam masyarakat
3. Kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya
4. Kemampuan berpikir kritis dan sistematis
5. Kemampuan menyelesaikan konflik dengan cara damai tanpa kekerasan
6. Kemampuan mengubah gaya hidup dan pola makanan pokok yang sudah biasa guna melindungi lingkungan
7. Memiliki kepekaan terhadap dan mempertahankan hak asasi manusia (seperti hak kaum wanita, minoritas etnis, dsb)
8. Kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik pada tingkatan pemerintahan lokal, nasional, dan internasional

Karakteristik warganegara di atas dibutuhkan sebagai dasar bagi peneguhan masyarakat multikultural, yang dalam pandangan Cogan (1998:2-3) diidentifikasi ke dalam lima atribut kewarganegaraan yang mungkin akan berbeda di tiap negara sesuai dengan sistem politik negara masing-masing, yakni: (1) *a sense of identity*; (2) *the enjoyment of certain rights*; (3) *the fulfilment of corresponding obligations*; (4) *a degree of interest and involvement in public affairs*; and (5) *an acceptance of basic societal values*. Bagi Indonesia, karakter kewarganegaraan akan memiliki kekhususan sesuai dengan ideologi yang dianut, yakni Pancasila, dan Konstitusi yang berlaku di Indonesia, ialah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Terdapat beberapa hal yang diperlukan seorang guru dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam peneguhan masyarakat multikultural Indonesia. Adapun langkah-langkah pembelajaran PKn berbasis multikultural dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Langkah-langkah Pembelajaran PKn Berbasis Multikultural (Rondli, 2014: 4).

Berdasarkan tabel yang ada di atas terdapat lima tahap yang perlu dilakukan oleh seorang guru mengenai langkah-langkah pembelajaran PKn berbasis kearifan lokal. *Pertama*, menentukan materi pembelajaran dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar apa yang akan diajarkan berbasis multikultural sesuai dengan Permendiknas No 22 Tahun 2006. Sebab tidak semua materi dapat disamakan melalui proses pembelajaran berbasis multikultural. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester pertama materi yang dapat disampaikan melalui proses pembelajaran berbasis multikultural salah satunya materi tentang memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan indikator yang ditetapkan dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam pembelajaran PKn berbasis multikultural. *Ketiga*, menetapkan metode yang akan digunakan, dalam hal ini penulis menganjurkan untuk menggunakan metode *Contextual Teaching and Learning (CTL)*.

Metode CTL ditentukan oleh guru sendiri dan disesuaikan dengan karakteristik dan materi yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. *Keempat*, menentukan media pembelajaran yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Guru dalam menentukan media harus jeli dan bisa menyesuaikan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah, penggunaan media pembelajaran disini bertujuan agar memberikan kemudahan pada siswa untuk memahami materi secara mendalam. *Kelima*, setelah semua

langkah-langkah yang ada sudah terlaksana maka guru selanjutnya melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilannya.

Berkenaan dengan sesuatu yang diperlukan dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Aly, (2005: 42) menjelaskan tiga faktor dalam manajemen pembelajaran, yaitu: (a) lingkungan fisik (*physical environment*), (b) lingkungan sosial (*human environment*), dan (c) gaya pengajaran guru (*teaching style*). Selama proses pembelajaran yang diperlukan siswa adalah lingkungan sosial dan fisik yang nyaman serta menyenangkan, untuk itu guru sebagai pendidik harus mampu mempertimbangkan beberapa aspek diantaranya adalah penataan meja dan kursi, warna, tanaman, dan pencahayaan. Dengan demikian, akan tercipta lingkungan sosial dan fisik yang aman dan nyaman untuk siswa. Lebih dari itu, guru juga harus mampu memahami latar belakang budaya siswanya karena dengan guru yang memiliki pemahaman terhadap latar belakang budaya siswanya, akan menciptakan lingkungan fisik yang kondusif untuk belajar. Sementara itu, lingkungan sosial yang aman dan nyaman dapat diciptakan oleh guru melalui bahasa yang dipilih, hubungan simpatik antar siswa, dan perlakuan adil terhadap siswa yang beragam budayanya.

Selain lingkungan fisik dan sosial, siswa juga memerlukan gaya pengajaran guru yang menggembarakan. Dalam proses pembelajaran, gaya kepemimpinan guru sangat berpengaruh bagi ada-tidaknya peluang siswa untuk berbagi pendapat dan membuat keputusan. Gaya kepemimpinan guru berkisar pada otoriter, demokratis, dan bebas (*laissez faire*). Gaya kepemimpinan otoriter tidak memberikan peluang kepada siswa untuk saling berbagi pendapat. Apa yang diajarkan guru kepada siswa ditentukan sendiri oleh sang guru. Sebaliknya, gaya kepemimpinan guru yang demokratis memberikan peluang kepada siswa untuk menentukan materi yang perlu dipelajari siswa. Selanjutnya, guru yang menggunakan gaya kepemimpinan bebas (*laissez faire*) menyerahkan sepenuhnya kepada siswa untuk menentukan materi pembelajaran di kelas.

Bentuk pendekatan yang demokratis ini akan sangat membantu siswa memahami materi yang dikembangkan dikelas maupun luar kelas. Dengan pendekatan ini, para guru dapat menggunakan beragam strategi pembelajaran, seperti dialog, simulasi, bermain peran, observasi, dan penanganan kasus (Aly, 2003: 70-71). Melalui dialog para guru, misalnya, mendiskusikan sumbangan aneka budaya dan orang dari suku lain dalam hidup bersama sebagai bangsa. Selain itu, melalui dialog para guru juga dapat mendiskusikan bahwa semua orang dari budaya apa pun ternyata juga menggunakan hasil kerja orang lain dari budaya lain. Sementara itu, melalui simulasi dan bermain peran, para siswa difasilitasi untuk

memerankan diri sebagai orang-orang yang memiliki agama, budaya, dan etnik tertentu dalam pergaulan sehari-hari. Dalam momen-momen tertentu, diadakan proyek dan kepanitiaan bersama, dengan melibatkan aneka macam siswa dari berbagai agama, etnik, budaya, dan bahasa yang beragam. Sedangkan melalui observasi dan penanganan kasus, siswa dan guru difasilitasi untuk tinggal beberapa hari di masyarakat multikultural. Mereka diminta untuk mengamati proses sosial yang terjadi di antara individu dan kelompok yang ada, sekaligus untuk melakukan mediasi bila ada konflik di antara mereka.

Dengan strategi pembelajaran tersebut para siswa diasumsikan akan memiliki wawasan dan pemahaman yang mendalam tentang adanya keragaman dalam kehidupan sosial. Bahkan, mereka akan memiliki pengalaman nyata untuk melibatkan diri dalam mempraktikkan nilai-nilai dari pendidikan multikultural dalam kehidupan sehari-hari. Sikap dan perilaku yang toleran, simpatik, dan empatik pun pada gilirannya akan tumbuh pada diri masing-masing siswa. Dengan demikian, proses pembelajaran yang difasilitasi guru tidak sekadar berorientasi pada ranah kognitif, melainkan pada ranah afektif dan psikomotorik sekaligus. Selanjutnya, pendekatan demokratis dalam proses pembelajaran dengan beragam strategi pembelajaran tersebut menempatkan guru dan siswa memiliki status yang setara (equal status), karena masing-masing dari mereka merupakan anggota komunitas kelas yang setara juga. Setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang absolut. Perilaku guru dan siswa harus diarahkan oleh kepentingan individu dan kelompok secara seimbang.

Lebih jauh, pendekatan demokratis dalam pembelajaran ini menuntut guru memiliki kompetensi multikultural. Farid Elashmawi dan Philip P. Harris (Aly, 2005) menawarkan enam kompetensi multikultural guru, yaitu: (a) memiliki nilai dan hubungan sosial yang luas, (b) terbuka dan fleksibel dalam mengelola keragaman siswa, (c) siap menerima perbedaan disiplin ilmu, latar belakang, ras, dan gender; (d) memfasilitasi pendatang baru dan siswa yang minoritas, (e) mau berkolaborasi dan koalisi dengan pihak mana pun, dan (f) berorientasi pada program dan masa depan. Selain itu, James A. Bank (Aly, 2005) menambahkan kompetensi multikultural lain yang harus dimiliki oleh guru, yaitu: (a) sensitif terhadap perilaku etnik para siswa, (b) sensitif terhadap kemungkinan adanya kontroversi tentang materi ajar, dan (c) menggunakan teknik pembelajaran kelompok untuk mempromosikan integrasi etnik dalam pembelajaran.

C. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan berbasis multikultural paraksis menjadi suatu usaha dalam meneguhkan masyarakat multikultural Indonesia. Dengan pembelajaran Pendidikan Kewarganegara, siswa akan dibekali pemahaman yang mendalam terkait bagaimana menyikapi keragaman dan siswa juga ditanamkan kemampuan untuk memahami, menerima, dan menghormati perbedaan-perbedaan budaya, sebab materi yang termuat dalam Pendidikan Kewarganegaraan sejalan dengan nilai-nilai multikultural Indonesia, yang diperlukan sekarang hanya bagaimana seorang guru mampu memahami keragaman, mampu mengembangkan pembelajaran, dan mampu menggunakan media pembelajaran.

Lebih dari itu, pendidikan multikultural melalui pendidikan kewarganegaraan juga menemukan relevansinya untuk konteks Indonesia. Sebagai sebuah konsep, pendidikan multikultural sejalan dengan semangat semboyan bangsa Indonesia “*Bhinneka Tunggal Ika*”. Semboyan yang sangat adil dan demokratis ini memiliki pengertian bahwa Indonesia merupakan salah satu bangsa di dunia yang terdiri dari beragam suku dan ras, yang mempunyai budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda tetapi dalam kesatuan Indonesia. Semboyan ini mengandung seni manajemen untuk mengatur keragaman Indonesia (*the art of managing diversity*).

Tawaran dan rekomendasi pada karya tulis ini adalah Sekolah perlu bekerja untuk menerapkan kewarganegaraan multikultural yang mengakui hak dan kebutuhan siswa untuk mempertahankan komitmen terhadap komunitas budaya mereka dan negara-negara tempat mereka tinggal. Dalam implementasi Pembelajaran PKn untuk peneguhan masyarakat multikultural Indonesia guru harus memperhatikan langkah-langkah dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebab tidak semua materi yang ada dalam pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dikembangkan melalui pembelajaran PKn berbasis multikultural. Langkah-langkah yang dimaksud adalah langkah-langkah pembelajaran PKn berbasis multikultural. *Pertama*, menentukan materi pembelajaran dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar apa yang akan diajarkan berbasis multikultural sesuai dengan Permendiknas No 22 Tahun 2006. Sebab tidak semua materi dapat disampaikan melalui proses pembelajaran berbasis multikultural. Pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas X semester pertama materi yang dapat disampaikan melalui proses pembelajaran berbasis multikultural salah satunya materi tentang memahami hakikat bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Kedua*, menetapkan tujuan pembelajaran berdasarkan

indikator yang ditetapkan dari Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar dalam pembelajaran PKn berbasis multikultural.

Ketiga, menetapkan metode yang akan digunakan, dalam hal ini penulis menganjurkan untuk menggunakan metode *Contextual Teaching and Learning* (CTL). Metode CTL ditentukan oleh guru sendiri dan disesuaikan dengan karakteristik dan materi yang akan dikembangkan dalam pembelajaran. *Keempat*, menentukan media pembelajaran yang disesuaikan dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar. Guru dalam menentukan media harus jeli dan bisa menyesuaikan dengan sarana prasarana yang ada di sekolah, penggunaan media pembelajaran disini bertujuan agar memberikan kemudahan pada siswa untuk memahami materi secara mendalam. *Kelima*, setelah semua langkah-langkah yang ada sudah terlaksana maka guru selanjutnya melakukan evaluasi dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Aly, A. (2005). "Pendidikan multikultural dalam tinjauan pedagogik". Makalah dipresentasikan pada "*Seminar Pendidikan Multikultural sebagai Seni Mengelola Keragaman*", yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Budaya dan Perubahan Sosial (PSB-PS) Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada Sabtu, 8 Januari 2005.
- Arif, D. B. (2008). "Kompetensi Kewarganegaraan untuk Pengembangan Masyarakat Multikultural Indonesia". *Acta Civicus: Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1 (3). 19-25
- Azra, A. (2006). *Pancasila dan Identitas Nasional Indonesia: Perspektif Multikulturalisme*". Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan politik identitas dan modernitas*. Bogor: Brighten Press.
- Bank, J. A. (1989). *Multicultural education: Issues and perspectives*. London: Allyn and Bacon Press.
- Blum, L. A. (2001). "Antirasisme, Multikulturalisme, dan Komunitas Antar-Ras: Tiga Nilai yang Bersifat Mendidik bagi Sebuah Masyarakat Multikultural". Dalam May, Larry, Shari Collins-Chobanian, and Kai Wong (Eds). *Etika Terapan I: Sebuah pendekatan*

multikultural. Terjemahan oleh Sinta Carolina dan Dadang Rusbiantoro. Yogyakarta: PT Tiara Wacana.

Cogan, J. J., & Derricott, R. (1998). *Citizenship for the 21st Century: An international perspective on education*. London: Kogan Page.

Garcia, R. L.(1982). *Teaching in a pluristic society: Concepts, models, strategies*. New York: Harper & Row Publisher.

Goh, M. (2012). Teaching with cultural intelligence: developing multiculturally educated and globally engaged citizens. *Asia Pacific Journal of Education*, 32 (4), 395–415

Hefner, R. W. (2007). *Politik multikulturalisme: Menggugat realitas kebangsaan*. Terjemahan oleh Bernardus Hidayat dari judul asli “The Politics of Multiculturalism, Pluralism and Citizenship in Malaysia, Singapore, and Indonesia”. Yogyakarta: Kanisius.

Huerta, G. C. (2016). Barriers to the Implementation of Multicultural Education in a Secondary Teacher Preparation Program. *The High School Journal*, 82 (3) 150-164

Hidayatullah, M. F. (2011). “Pendidikan Karakter dan Pengembangan Metode Pembelajaran Nilai”. Bahan tayangan disampaikan dalam Pentaloka Doswar se-Jawa Tengah dan DIY di Dodik Bela Negara Resimen Kodam IV/Diponegoro Magelang, 12 April 2011.

Karsten, S., Kubow, P., Matrai, Z., & Pitiyanuwat, S. (2000). Challenges facing the 21st century citizen: Views of policy makers. In J. Cogan & R. Derricott (Eds.), *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education* (pp. 109–130). London: Kogan Page.

Kubow, P., Grossman, D. L., & Ninomiya, A. (2000). Multidimensional citizenship: Educational policy for the 21st century. In J. Cogan & R. Derricott (Eds.), *Citizenship for the 21st century: An international perspective on education* (pp. 131–150). London: Kogan Page.

Rondli, W. S. (2014). Strategi pembelajaran PKn berbasis multikultural: Studi kasus di SMA Mataram kota Semarang *Jurnal ilmiah civic*, IV (2) 4-5

- Saha, L. J. (1997). *International encyclopedia of sociology of education (Resources in Education Series)*. New York: Pergamon
- Saifuddin, A. F. (2006). Reposisi Pandangan mengenai Pancasila: Dari Pluralisme ke Multikulturalisme. Dalam *Restorasi Pancasila: Mendamaikan politik identitas dan modernitas*. Bogor: Brighten Press
- Suparlan, P. (2005). *Sukubangsa dan hubungan antar sukubangsa*. Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian.
- Tilaar, H.A.R. (2004). *Multikulturalisme: Tantangan-tantangan global masa depan dalam transformasi pendidikan nasional*. Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Wang, J., Lin, E., Spalding, E., Odell, S. J., & Klecka, C. L. (2011). Understanding teacher education in an era of globalization. *Journal of Teacher Education*, 62 (2).